SINKRONISASI PERENCANAAN PEMANFAATAN DANA DESA ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Politeia Salma Nestyajatmiko
NPP. 33.0569
Program Studi Keuangan Publik
Email: politeiasn@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Tumija, S.Pd., M.M
Email: tumija@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Village development through Village Fund utilization is an important instrument in improving community welfare and encouraging equitable development. However, synchronization between village government planning and district government planning has not been optimal, causing program misalignment and overlapping activities in Trenggalek Regency. Village planning documents such as RKPDes are often not fully aligned with district planning documents such as RKPD.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the synchronization of Village Fund utilization planning between village governments and the Trenggalek Regency Government and to identify efforts to strengthen the synchronization process.* ***Method:*** *This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation with purposively selected informants consisting of village government officials and the Community and Village Empowerment Office of Trenggalek Regency. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using synchronization dimensions consisting of integrated, fast, efficient, and targeted indicators.* ***Result:*** *The The findings show that the synchronization of Village Fund utilization planning between village governments and the Trenggalek Regency Government has generally been implemented quite well in terms of integrated, fast, efficient, and targeted dimensions. However, obstacles are still found in the efficiency dimension, especially in the utilization of planning applications such as SIPD and Siskeudes. Other inhibiting factors include limited human resource capacity, weak coordination, and minimal data integration between levels of government.* ***Conclusion:*** *Synchronization of Village Fund utilization planning in Trenggalek Regency requires strengthening through increasing village apparatus capacity, improving intergovernmental coordination, optimizing information systems, and increasing community participation so that development planning can be more effective, efficient, and sustainable.*

Keywords: *Synchronization, Planning Utilization, and Village Funds*

ABSTRAK

Permasalahan : Pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Namun, sinkronisasi perencanaan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten di Kabupaten Trenggalek masih belum optimal sehingga menimbulkan ketidaksesuaian program dan potensi tumpang tindih kegiatan. Dokumen perencanaan desa seperti RKPDes belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten seperti RKPD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi

perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara pemerintah desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta mengetahui upaya penguatan sinkronisasi tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu aparatur pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan dimensi sinkronisasi yaitu terpadu, cepat, efisien, dan terarah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara umum telah berjalan cukup baik ditinjau dari dimensi terpadu, cepat, efisien, dan terarah. Namun, masih terdapat kendala pada dimensi efisien terutama dalam pemanfaatan aplikasi perencanaan seperti SIPD dan Siskeudes. Faktor penghambat lainnya meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya koordinasi, dan minimnya integrasi data antar tingkat pemerintahan. **Kesimpulan:** Sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Trenggalek perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi lintas pemerintahan, optimalisasi sistem informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Sinkronisasi, Perencanaan Pemanfaatan, dan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena desa berperan sebagai pusat pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Desa menjadi titik awal dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan sosial, dan pengembangan potensi lokal. Oleh sebab itu, proses perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, terarah, serta berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat agar dana publik, termasuk Dana Desa, dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran (Suharto, 2020: 55).

Sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten diperlukan untuk memastikan bahwa program pembangunan desa selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Kesesuaian perencanaan antara dokumen desa seperti RPJMDes dan RKPDes dengan dokumen kabupaten seperti RPJMD dan RKPD akan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan, pemborosan anggaran, dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan koordinasi yang baik dan integrasi data perencanaan antar level pemerintahan, pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan lebih terarah, konsisten, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah (Widjaja, 2015: 103).

Dana desa sudah mulai disalurkan sejak tahun 2015 dengan total dana desa yang telah dikucurkan selama periode 2015–2024 mencapai Rp609,9 triliun, dengan rata-rata penyaluran tahunan sebesar lebih dari Rp68 triliun kepada 74.961 desa di seluruh. Pada tahun 2024, pemerintah menyalurkan Rp71 triliun dana desa yang difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur desa skala kecil. Program tersebut terbukti berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan perdesaan dari 14,21% pada tahun 2015 menjadi 11,18% pada tahun 2023 (Sari & Rabiana Risma, 2024: 3). Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah berkomitmen kuat untuk menjadikan desa sebagai pusat pembangunan nasional. Dana desa sudah digunakan untuk membangun sarana prasarana dasar, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menguatkan ketahanan pangan, hingga upaya memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain itu, dana tersebut juga ditujukan untuk

mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rizal, dkk., 2025: 24).

Namun, demikian besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat efektivitas penggunaannya, terutama jika perencanaan di tingkat desa belum selaras dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Walaupun dana desa memberikan dampak positif, implementasi yang dihasilkan menghadapi tantangan besar terkhusus dalam hal sinkronisasi perencanaan. Sinkronisasi tersebut mengacu pada keselarasan atau kesesuaian antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Tanpa adanya sinkronisasi, penggunaan dana desa menjadi tidak efektif, tidak berkelanjutan, hingga berpotensi menyebabkan tumpang tindih program dan kegiatan yang ada. Terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa kelemahan utama pada pengelolaan dana desa yaitu kurangnya koordinasi serta integrasi perencanaan antar level pemerintahan (Rae, dkk., 2025: 9).

Kabupaten Trenggalek dengan semua potensi beserta tantangannya adalah contoh nyata dari mengapa sinkronisasi menjadi suatu faktor yang sangat krusial. Trenggalek dikenal sebagai kabupaten yang mempunyai sebagian besar topografi berupa pegunungan dan perbukitan, sehingga pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik sangat sering menghadapi kendala geografis. Di dalam situasi yang seperti demikian, perencanaan pembangunan yang matang juga sinkronisasi antar level pemerintahan sangatlah dibutuhkan. Tanpa hadirnya kerjasama yang baik, pembangunan infrastruktur di desa dapat tidak terhubung dengan jaringan infrastruktur di kabupaten, sehingga akses masyarakat desa tetap terhambat walaupun sudah mengunakan dana yang tidak sedikit (Zain, 2017: 4).

Pada konteks akademis, penelitian mengenai sinkronisasi perencanaan pemanfaatan dana desa mempunyai urgensi tersendiri. Meskipun terdapat berbagai penelitian mengenai pengelolaan dana desa, masih terdapat gap penelitian yang signifikan, khususnya terkait sinkronisasi perencanaan pemanfaatan dana desa antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Literatur yang ada umumnya lebih menekankan pada aspek akuntabilitas keuangan serta efektivitas program, sementara untuk aspek sinkronisasi perencanaan sering kali tidak mendapatkan perhatian khusus (Sarmadan & Kasim, 2025: 4).

Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan mampu menjadi masukan penting untuk pemerintah daerah ataupun desa. Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai salah satu pedoman dalam membuat kebijakan pembinaan serta pengawasan desa yang lebih terarah. Pemerintah desa bisa menjadikannya sebagai acuan dalam memperbaiki perencanaan, meningkatkan kapasitas SDM perangkat desa, serta memperbesar partisipasi masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai Dana Desa telah berkembang secara signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai penelitian umumnya berfokus pada pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas keuangan desa, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta kontribusi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Komang Adi Kurniawan Saputra et al. (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang akuntabel menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Subekti (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif mampu mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Di tingkat nasional, berbagai penelitian lebih banyak mengkaji aspek implementasi kebijakan Dana Desa, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap pembangunan desa. Suryani (2019) menemukan bahwa manajemen pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa. Sementara itu, Wahyudi (2023) menjelaskan bahwa keberadaan Dana Desa telah memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Meskipun

demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan Dana Desa sebagai instrumen pembiayaan pembangunan tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap bagaimana proses sinkronisasi perencanaan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dilakukan sebelum program pembangunan dilaksanakan.

Penelitian internasional juga menunjukkan pentingnya integrasi perencanaan dalam sistem pemerintahan yang menerapkan desentralisasi. Widianingsih dan Morrell (2007) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan partisipatif sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menciptakan sinergi antara pendekatan pembangunan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up). Kajian tersebut menegaskan bahwa proses pembangunan tidak hanya membutuhkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memerlukan keterpaduan perencanaan antara berbagai tingkatan pemerintahan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek partisipasi pembangunan dan belum secara khusus mengkaji sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan desa.

Di Kabupaten Trenggalek, penelitian yang berkaitan dengan Dana Desa umumnya berfokus pada pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan desa. Penelitian Sundari dan Rahmawati (2023) menyoroti aspek akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa, sedangkan Prihatiningtyas et al. (2024) membahas peran BUMDes dalam mendukung pengembangan desa wisata. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap kajian pembangunan desa, namun belum secara khusus mengkaji sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas keuangan desa, efektivitas pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan integrasi pembangunan secara umum. Sementara itu, kajian yang secara spesifik menganalisis sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menggunakan perspektif sinkronisasi yang mencakup dimensi terpadu, cepat, efisien, dan terarah sebagai alat analisis untuk memahami hubungan antara perencanaan pembangunan desa dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, *research gap* penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan dimensi sinkronisasi berupa terpadu, cepat, efisien, dan terarah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui studi pada Kabupaten Trenggalek.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki urgensi yang tinggi baik dari aspek teoritis, praktis, maupun kebijakan. Urgensi tersebut muncul karena Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa dan mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah karena keduanya merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, sinkronisasi perencanaan menjadi kebutuhan penting untuk memastikan bahwa program yang dibiayai melalui Dana Desa mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh (Kurniati, 2018).

Dari sisi teoritis, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Selama ini, penelitian mengenai Dana Desa lebih banyak berfokus pada aspek pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi, efektivitas program, serta dampaknya terhadap pembangunan desa. Sementara itu, kajian yang membahas sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara

pemerintah desa dan pemerintah kabupaten masih relatif terbatas. Padahal, sinkronisasi perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antartingkat pemerintahan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sinkronisasi yang menekankan pentingnya keterpaduan, kecepatan, efisiensi, dan keterarahan dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui penelitian ini, konsep sinkronisasi perencanaan dapat diuji secara empiris dalam konteks hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sehingga dapat memperluas khasanah keilmuan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dari aspek praktis, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam memahami sejauh mana keterkaitan antara dokumen perencanaan yang disusun pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Informasi tersebut penting karena perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian program, duplikasi kegiatan, serta penggunaan sumber daya yang kurang optimal. Sebaliknya, perencanaan yang tersinkronisasi dapat menciptakan keterpaduan pembangunan sehingga program yang dilaksanakan di tingkat desa mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dari aspek kebijakan, penelitian ini memiliki urgensi yang berkaitan dengan implementasi berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi dengan pembangunan daerah. Di sisi lain, sistem perencanaan pembangunan nasional juga mengharuskan adanya keterkaitan antara dokumen perencanaan pada setiap tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan amanat kebijakan yang harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan teori sinkronisasi perencanaan, penyediaan informasi praktis bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, serta penguatan implementasi kebijakan pembangunan yang terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan Dana Desa, sinkronisasi pembangunan, dan perencanaan pembangunan desa. Penelitian terdahulu menjadi dasar bagi penulis untuk melihat perbedaan fokus penelitian serta menemukan kebaruan penelitian yang dilakukan.

Penelitian Sarmadan & Kasim (2025, 80) yang berjudul "Sinkronisasi Dana Desa dan SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Desa Studi Desa Andeposandu, Konawe". Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas mengenai perencanaan pembangunan desa menggunakan dana desa. Bedanya, penelitian tersebut berfokus pada sinkronisasi dana desa dan SDGs di Desa Andeposandu, Kabupaten Konawe, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sinkronisasi perencanaan pemanfaatan dana desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Penelitian B. Hari Saptaning Tyas, dkk (2025, 110) yang berjudul "Model Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa Dalam Akselerasi *Sustainable Development Goals* Desa". Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Relevansi penelitian tersebut ada dalam kesamaan pembahasan mengenai perencanaan dana desa. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada perencanaan dan penganggaran dana desa di Desa Sumbermulyo, Bantul, DI Yogyakarta, sementara penelitian penulis berfokus pada perencanaan pemanfaatan dana desa di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian Syarif Hidayat, dkk (2022, 90) yang berjudul "Perencanaan Strategis Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY". Menggunakan metode penelitian kualitatif desskriptif. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas mengenai perencanaan pengelolaan/pemanfaatan dana desa. Bedanya, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2022 di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2025 di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian Berlian Putri Maharini & Rochmad Bayu Utomo (2018, 95) yang berjudul "Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)". Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Relevansi penelitian tersebut ada dalam kesamaan pembahasan mengenai perencanaan pengelolaan/pemanfaatan dana desa. Perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2025 di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian Ana Suryani (2019, 8) yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Dana Desa". Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas mengenai perencanaan/manajemen pengelolaan dana desa. Bedanya, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019 di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2025 di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian Yeni Nur Afifah (2019, 80) yang berjudul "Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa". Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Relevansi penelitian tersebut ada dalam kesamaan pembahasan mengenai perencanaan pemanfaatan dana desa. Perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019 di Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2025 di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian Erna Hendrawati dan Mira Pramudianti (2020, 18) yang berjudul "Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa". Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas mengenai perencanaan dana desa. Bedanya, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 di Desa Desa Setro, Kecamatan Menganti, Gresik, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2025 di Kabupaten Trenggalek.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang secara khusus mengkaji sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan Dana Desa sebagai objek kajian dalam perspektif pengelolaan keuangan, akuntabilitas, efektivitas penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan desa. Penelitian ini tidak berfokus pada bagaimana Dana Desa dikelola atau dipertanggungjawabkan, melainkan pada bagaimana proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa disinkronkan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, fokus penelitian ini berada pada aspek keterpaduan perencanaan pembangunan yang menjadi tahap awal dan fundamental dalam siklus pembangunan desa. Fokus tersebut memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek pelaksanaan dan hasil penggunaan Dana Desa.

Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan teori sinkronisasi yang terdiri atas dimensi terpadu, cepat, efisien, dan terarah sebagai alat analisis dalam mengkaji hubungan antara perencanaan pembangunan desa dan pembangunan daerah yang menunjukkan bahwa sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa dapat dianalisis melalui keterpaduan dokumen perencanaan, ketepatan waktu koordinasi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kesesuaian arah pembangunan. Temuan tersebut memberikan bukti empiris bahwa pembangunan desa dan pembangunan daerah memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan memerlukan proses sinkronisasi yang berkelanjutan. Temuan ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya Dana Desa yang diterima, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang mampu menghubungkan kepentingan pembangunan desa dengan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai praktik sinkronisasi perencanaan Dana Desa pada konteks Kabupaten Trenggalek.

1.6 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan dimensi terpadu, cepat, efisien, dan terarah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah melalui penggalian informasi secara langsung dari informan yang terlibat dalam proses perencanaan. Pendekatan kualitatif juga relevan untuk mengkaji fenomena administrasi pemerintahan yang memerlukan pemahaman terhadap proses, interaksi, dan keterpaduan kebijakan yang berlangsung dalam praktik pemerintahan (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya implementasi perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan Dana Desa. Kabupaten Trenggalek menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji sinkronisasi perencanaan karena pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelaraskan arah pembangunan melalui dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan pemanfaatan Dana Desa. Informan terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, unsur perangkat daerah yang terkait dengan pembinaan pemerintahan desa, pemerintah desa sebagai pelaksana perencanaan pembangunan desa, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data

sekunder berupa dokumen perencanaan pembangunan, peraturan perundang-undangan, laporan pembangunan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data direduksi dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara sistematis.

Uji validitas data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Melalui teknik tersebut, data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai sehingga dapat mendukung hasil penelitian secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sinkronisasi Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Analisis sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa dalam penelitian ini menggunakan teori sinkronisasi yang terdiri atas empat dimensi, yaitu terpadu, cepat, efisien, dan terarah. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menilai tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah dalam pemanfaatan Dana Desa.

3.1.1 Dimensi Terpadu

Dimensi terpadu menunjukkan adanya keterkaitan dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan desa dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Trenggalek telah mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku, baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan dokumen perencanaan lainnya dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pemerintah kabupaten.

Keterpaduan tersebut terlihat dari kesesuaian program pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sinkronisasi dokumen perencanaan memungkinkan adanya hubungan yang selaras antara kebutuhan pembangunan desa dan tujuan pembangunan daerah sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sinurat yang menyatakan bahwa sinkronisasi perencanaan harus menciptakan keterpaduan antara berbagai dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif.

3.1.2 Dimensi Cepat

Dimensi cepat berkaitan dengan ketepatan waktu dalam proses koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa

dan pemerintah kabupaten dilakukan melalui forum perencanaan pembangunan yang memungkinkan penyampaian usulan pembangunan desa secara tepat waktu.

Forum koordinasi tersebut menjadi sarana penyelarasan kebutuhan pembangunan desa dengan arah pembangunan daerah. Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan dan penyusunan dokumen perencanaan memberikan kontribusi terhadap proses sinkronisasi yang lebih baik. Dengan demikian, proses perencanaan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

3.1.3 Dimensi Efisien

Dimensi efisien berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam proses perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan koordinasi antarinstansi telah mendukung efisiensi proses sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa.

Efisiensi terlihat dari kemampuan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam menyelaraskan program pembangunan tanpa menimbulkan tumpang tindih kegiatan. Kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran juga menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan desa dan pembangunan daerah.

3.1.4 Dimensi Terarah

Dimensi terarah menunjukkan adanya kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa telah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten.

Program-program yang dibiayai melalui Dana Desa menunjukkan keterkaitan dengan tujuan pembangunan daerah sehingga menciptakan kesinambungan antara pembangunan desa dan pembangunan kabupaten. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa proses sinkronisasi tidak hanya terjadi pada tahap penyusunan dokumen, tetapi juga pada arah kebijakan pembangunan yang menjadi pedoman pelaksanaan program.

3.2 Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah berjalan cukup baik. Keterpaduan dokumen perencanaan, ketepatan waktu koordinasi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan kejelasan arah pembangunan menunjukkan adanya hubungan yang saling mendukung antara perencanaan pembangunan desa dan pembangunan daerah.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Dana Desa tidak hanya digunakan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan desa, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan secara berkelanjutan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara umum telah berjalan dengan baik melalui dimensi terpadu, cepat, efisien, dan terarah. Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa tidak dilaksanakan secara terpisah dari perencanaan pembangunan daerah, melainkan telah diupayakan untuk saling terhubung melalui mekanisme perencanaan yang berlaku. Keterkaitan tersebut terlihat dari adanya kesesuaian antara

dokumen perencanaan desa dengan dokumen perencanaan daerah sehingga program pembangunan yang direncanakan di tingkat desa dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan pembangunan desa, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah yang lebih luas.

Pada dimensi terpadu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan desa telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah. Keterpaduan tersebut tercermin dalam hubungan antara RPJM Desa, RKP Desa, dan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek. Temuan ini sejalan dengan pendapat Fanzikri (2019) yang menyatakan bahwa integrasi perencanaan merupakan syarat utama untuk menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan desa yang direncanakan secara terpisah dari pembangunan daerah berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian program dan duplikasi kegiatan. Oleh karena itu, keterpaduan perencanaan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan Widianingsih dan Morrell (2007) bahwa pembangunan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan membutuhkan sinergi antara pendekatan bottom-up dan top-down agar tercipta keselarasan arah pembangunan.

Pada dimensi cepat, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten telah dilaksanakan melalui berbagai forum perencanaan pembangunan yang memungkinkan proses penyelarasan program dilakukan secara tepat waktu. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan memiliki arti penting karena menentukan kualitas sinkronisasi yang dihasilkan. Apabila proses koordinasi berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan desa dan daerah dapat diminimalkan. Temuan ini menunjukkan bahwa sinkronisasi tidak hanya berkaitan dengan substansi perencanaan, tetapi juga berkaitan dengan aspek waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian, dimensi cepat menjadi faktor yang mendukung keberhasilan sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa

Pada dimensi efisien, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sinkronisasi telah mampu mendukung pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal. Efisiensi tersebut terlihat dari adanya kesesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, penggunaan sistem informasi dan koordinasi antarinstansi turut mendukung proses penyelarasan program sehingga dapat mengurangi potensi tumpang tindih kegiatan pembangunan. Temuan ini mendukung penelitian Juniawan (2019) yang menyatakan bahwa sistem perencanaan yang terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga dan menghasilkan perencanaan yang lebih efisien. Dalam konteks penelitian ini, efisiensi menunjukkan bahwa sinkronisasi tidak hanya menghasilkan kesesuaian dokumen perencanaan, tetapi juga berkontribusi terhadap penggunaan sumber daya pembangunan secara lebih tepat.

Pada dimensi terarah, penelitian menemukan bahwa pemanfaatan Dana Desa telah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang ditetapkan baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Keselarasan arah pembangunan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembangunan desa memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwa sinkronisasi perencanaan tidak hanya terjadi pada tingkat administratif, tetapi juga pada tingkat substansi kebijakan pembangunan. Program yang direncanakan melalui Dana Desa telah diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat desa sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa dan

pembangunan daerah merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan teori sinkronisasi yang digunakan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian membuktikan bahwa dimensi terpadu, cepat, efisien, dan terarah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keterpaduan dokumen perencanaan akan sulit terwujud tanpa adanya koordinasi yang tepat waktu. Demikian pula efisiensi penggunaan sumber daya akan sulit dicapai apabila arah pembangunan yang ditetapkan tidak jelas. Oleh karena itu, keberhasilan sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan keempat dimensi tersebut ke dalam proses perencanaan pembangunan. Temuan ini memperkuat teori Sinurat yang menempatkan sinkronisasi sebagai proses yang harus mampu menciptakan keterhubungan antarunsur perencanaan secara menyeluruh.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda karena tidak berfokus pada aspek akuntabilitas, efektivitas penggunaan Dana Desa, atau dampak pembangunan desa, melainkan pada proses sinkronisasi perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Penelitian Saputra et al. (2018), Subekti (2018), dan Suryani (2019) lebih banyak menyoroti pengelolaan Dana Desa setelah tahap perencanaan dilakukan. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pemanfaatan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas sinkronisasi perencanaan yang dilakukan sejak awal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas keterhubungan antara perencanaan pembangunan desa dan pembangunan daerah.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan kajian mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam konteks pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sinkronisasi perencanaan dapat dianalisis melalui dimensi terpadu, cepat, efisien, dan terarah untuk menjelaskan hubungan antara pembangunan desa dan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur administrasi pemerintahan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa memerlukan keterpaduan antara berbagai aktor, dokumen perencanaan, dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian akademik maupun praktik pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan. Sinkronisasi yang tercermin melalui dimensi terpadu, cepat, efisien, dan terarah mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pembangunan desa dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sinkronisasi perencanaan merupakan salah satu unsur strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa sekaligus memperkuat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui keterpaduan antara dokumen perencanaan desa dan daerah,

koordinasi yang berlangsung tepat waktu, pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta arah pembangunan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Melalui sinkronisasi tersebut, perencanaan pemanfaatan Dana Desa mampu mendukung keterkaitan antara pembangunan desa dan pembangunan daerah sehingga tujuan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Keterbatan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu penelitian yang relatif terbatas, cakupan lokasi yang berfokus pada Kabupaten Trenggalek, ketersediaan data yang bergantung pada dokumen dan informasi yang dapat diakses selama penelitian, serta jumlah informan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kualitatif. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian menggambarkan kondisi sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa pada lokus penelitian dan periode penelitian tertentu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian pada beberapa kabupaten sehingga memungkinkan dilakukannya analisis komparatif mengenai sinkronisasi perencanaan pemanfaatan Dana Desa. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai hubungan antara sinkronisasi perencanaan dan capaian pembangunan desa. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel penelitian yang berkaitan dengan integrasi perencanaan pembangunan, tata kelola pemerintahan desa, maupun efektivitas pemanfaatan Dana Desa sehingga dapat memperkaya kajian akademik mengenai pembangunan desa dan pembangunan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, pemerintah desa lokasi penelitian, dosen pembimbing, para informan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel repository ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abreu, I., Mesias, F. J., & Ramajo, J. (2021). Design and validation of an index to measure development in rural areas through stakeholder participation. *Socio-Economic Planning Sciences, 77*, 101074. https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101074

Akbar, B. (2013). *Manajemen Keuangan Di Pemerintahan Daerah: Suatu Konsep Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bumi Metro Jaya. https://perpustakaan.pom.go.id/slims/index.php?p=show_detail&id=4336

Ansari, M. G., & Sensarma, R. (2022). Does Economic Freedom Influence the FDI–Growth Nexus in ASEAN Economies? *Journal of Asian Economic Integration*, *4*(2). https://doi.org/10.1177/26316846221112228

Ardiensyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metode Penelitian Sosial*. Deepublish.

Ariadi, A. (2019). *Perencanaan Pembangunan Desa, 2*(2). https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1018350&val=15501

Aulia, R. R., Wahyunadi, & Agustiani, E. (2024). The Influence of Capital Expenditures and Investment on Economic Growth in West Nusa Tenggara Province 2012-2022. *Economy and Finance Enthusiatic*, *2(1)*. https://doi.org/10.59535/efe.v2i1.188

Bungin, B. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Kencana.

Ciftci, C., & Ciftci, D. D. (2022). Economic freedom, foreign direct investment, and economic growth: The role of sub-components of freedom. *The Journal of International Trade & Economic Development*, *31*(2). https://doi.org/10.1080/09638199.2021.1962392

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Danil, D., & Rochayati, N. (2025). Analisis dinamika penduduk dan perubahan komposisi demografi di Indonesia: Implikasi bagi perencanaan pembangunan. *Education, Social Sciences, and Linguistic: Conference Series, 1*(2). https://journal.ummat.ac.id/index.php/ecs

Elison, J. P., & Hahury, J. F. (2023). Implementasi fungsi kepala desa dalam pembangunan. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 21*(1). https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.728

Fanzikri, M. (2019). *Integrasi perencanaan pembangunan desa dan daerah*. Rekonstruksi Administrasi Publik.

Fitratun Anesya, S. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Hasyadi, K., Nurhayati, I., & Royadi, A. A. (2023). Analisis sektor unggulan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Cendekia Keuangan, 2*(1). https://doi.org/10.32503/jck.v2i1.3073

IRE. (2015). *Mengintegrasikan perencanaan pembangunan desa*. Institute for Research and Empowerment.

Khairi, H. (2014). *Konsep Dasar Kebijakan Publik* (S. Budiaman (ed.)). Universitas Terbuka.

Komang Adi Kurniawan Saputra, K. A., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 3*(1). https://doi.org/10.20473/jraba.v3i1.46060

Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Masbiran, V. U. K., Murliasari, R., Afriyanni, & Wulandari, S. N. (2021). Constraint and Strategies Element for Increasing Effectiveness Village Fund Management Based Interpretive Structural Modelling. *Jurnal Bina Praja, 13*(3). https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.445-457

Murliasari, R. (2021). *Implementation of Village Fund Management Policy Affirmation in Village Development*. Jurnal Bina Praja, 13(3). https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.555-567

Nguyen, M.-L. T. (2022). Foreign direct investment and economic growth: The role of financial development. *Cogent Business & Management*, *9*. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2127193

Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). *The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to Sustainable Development Goals*. Sustainability, 13(21), 12294. https://doi.org/10.3390/su132112294

Prihatiningtyas, W., Wahyuni, I., Noviyanti, U. D. E., & Noventri, A. C. (2024). Revitalisasi badan usaha milik desa yang inovatif dalam mengembangkan desa wisata di Desa Dongko, Trenggalek. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2*(1). https://doi.org/10.54082/ijpm.401

Rae, M. V., Malut, M. G., Timuneno, A. Y. W., & Akun, S. (2025). Analisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains, 2*(2). https://journal.widyatama.ac.id/index.php/bes

Rizal, M., Gustami, H., Muttaqim, H., Saleh, M., & Rizkina, A. (2025). Program ketahanan pangan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bireuen. *Indonesian Journal of Development Management, 6*(12). https://doi.org/10.55178/idm.v6i12.537

Rusmiati, Utari, G., & Haq, M. A. (2026). Investment, Absorptive Capacity, and Regional Economic Growth: Explaining Heterogeneous Outcomes across Indonesian Provinces. *Journal of Regional Economics Indonesia*, *7(1)*. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/article/view/16861

Sari, A. P., Rahmadini, G., Charlina, H., Pradani, Z. E., & Ramadan, M. I. (2023). Analisis masalah kependudukan di Indonesia. *Journal of Economic Education, 2*(1). https://doi.org/10.22437/jeec.v2i1.23180

Sari, P. Y., & Risma, O. R. (2024). Implementasi dana desa dalam upaya mengurangi kemiskinan (Studi kasus Provinsi Aceh). *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*.

Sarmadan, & Kasim, S. S. (2025). Sinkronisasi dana desa dan SDGs dalam perencanaan pembangunan desa: Studi Desa Andeposandu, Konawe. *Jurnal Administrasi Publik, 5*(1).

Simanjuntak, T. L. R., Todingbua, M. A., & Buku, B. (2025). Efisiensi penganggaran dalam melaksanakan program kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal, 3*(2). https://doi.org/10.57185/mutiara.v3i2.348

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia.

Sinurat, M., Sudrajat, I., & Komedi, K. (2023). Kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10*(2). https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3922

Sowrov, S. M. T. H. (2025). The Effect of Foreign Direct Investment on Economic Growth in South Asian Countries. *Cornell University*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.16958

Subekti, D. R. (2018). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi pada Pemerintah Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 5*(2). https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi penelitian*. Gadjah Mada University Press.

Sundari, N., & Rahmawati, M. I. (2023). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12*(10). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5578

Suryani, A. (2019). Manajemen pengelolaan dana desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 4*(2). https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117

Suwanda, D., Simanjuntak, T. H., & Rowa, H. (2024). *Optimalisasi penyusunan APBD yang cermat: mendorong pembangunan daerah berkelanjutan*. Rosda.

Taherdoost, H. (2022). What are different research approaches? Comprehensive review of qualitative, quantitative, and mixed method research, their applications, types, and limitations. *Journal of Management Science & Engineering Research, 5*(1), 53–63. https://doi.org/10.30564/jmser.v5i1.4538

Wahyudi, J. (2023). Pemerintahan desa pasca UU Desa: Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5*(1). https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing

Wandi, H. (2023). *Persebaran penduduk di Indonesia*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/368817650

Wang, X., Xu, Z., Qin, Y., & Skare, M. (2021). Foreign direct investment and economic growth: a dynamic study of measurement approaches and results. *ECONOMIC RESEARCH*, *35*. https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1952090

Wardhana, M. D. A., Ramadhan, M. R. H. I., & Indawati, Y. (2023). Optimalisasi kewenangan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Dongko melalui legislasi desa. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1*(2). https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.154

Widianingsih, N., & Morrell, E. (2007). *Participatory planning in Indonesia: Seeking synergy between top-down and bottom-up development*. Policy Studies.

Yang, S.-P. (2024). The Determinants and Growth Effects of Foreign Direct Investment: A Comparative Study. *Journal of Risk and Financial Management*. https://doi.org/10.3390/jrfm17120541

Yeboah, E., Baffour, A. A., Chibalamula, H. C., & Atiso, F. (2025). The significance of foreign direct investment (FDI) and trade openness: evidence from nine European economies. *SPRINGER NATURE Business & Economics*, *5*. https://doi.org/10.1007/s43546-025-00798-8

Yusuf, M., Poetiray, G., Purnomo, D., & Utomo, A. W. (2023). Peluang dan tantangan pemanfaatan bonus demografi pada aspek ketenagakerjaan di Kota Salatiga. *Jurnal Kependudukan Indonesia, 18*(1). https://doi.org/10.55981/jki.2023.1387

Yuwono, J. S. E., Prariyadiyani, J., & Pranadipta, R. (2022). Potensi geoarkeologi wilayah Trenggalek dan peluangnya bagi pengembangan geopark. *Jurnal Geologi Indonesia, 5*(1).

Zain, I. M. (2017). Kajian potensi wisata pantai Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pendidikan Geografi, 5*(4). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/22274